

## Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir

Hendra<sup>1\*</sup>, Muhammad Nur<sup>2</sup>, Haeril<sup>3</sup>, Junaidin<sup>4</sup>, Sri Wahyuli<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mbojo Bima; hen.dra13@yahoo.co.id

<sup>2</sup> Universitas Mbojo Bima; muhammadnurnur464@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Mbojo Bima; haeril.terminator@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Mbojo Bima; junaidinmahmud724@gmail.com

<sup>5</sup> Universitas Mbojo Bima; sriwstisip78@gmail.com

\* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Masyarakat Miskin; Sosial Ekonomi; Strategi pemberdayaan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, Pemerintah Kabupaten Bima melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan perikanan dengan membentuk Pokmaswas. Selain itu pemberdayaan juga dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dalam mewujudkan masyarakat perikanan yang memiliki motivasi, terampil, berwawasan luas dan mampu bekerjasama dalam suatu wadah kelompok melalui program peningkatan dan pengembangan produksi, pengolahan dan mutu hasil perikanan, pengembangan usaha bidang penangkapan dan budidaya serta usaha bidang pengolahan hasil perikanan. Juga pendampingan Pemberdayaan bagi Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Pemberdayaan juga dilakukan dari sektor pariwisata terutama dalam mendukung Program prioritas SAKOSA melalui pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu juga ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masyarakat pesisir dibentuk untuk mewujudkan kemitraan dalam pengembangan, penataan, pemeliharaan dan promosi wisata di Kabupaten Bima.

### Keywords

Poor society;  
Socioeconomic;  
Empowerment strategy.

### Abstract

This study aims to determine the strategies for socio-economic empowerment of coastal communities in Bima Regency. This research uses descriptive qualitative method. The location of this research is the Department of Tourism, the Office of Maritime Affairs and Fisheries, and the Department of the Environment of Bima Regency. The results of the study show that in empowering socio-economic coastal communities, the Government of Bima Regency implements community empowerment programs in monitoring and controlling marine and fisheries resources by forming Pokmaswas. In addition, empowerment is also carried out through the coastal community economic empowerment program (PEMP) in realizing a fishing community that is motivated, skilled, broad-minded and able to work together in a group forum through programs to increase and develop production, processing and quality of fishery products, business development in the fishing sector. and cultivation as well as fishery product processing business. Also assistance for Empowerment for People's Salt Businesses (PUGAR). Empowerment is also carried out from the tourism sector, especially in supporting the SAKOSA priority program through the development of the Creative Economy (Ekraf) in boosting the economy of coastal communities. In addition, there is also a Tourism Awareness Group (Pokdarwis) for coastal communities formed to realize partnerships in the development, arrangement, maintenance and promotion of tourism in Bima Regency.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Sitasi:

Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1).

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi individu maupun keluarganya (Annur, 2013). Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan

kebutuhan pokok, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan, yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum (Raihanr, 2020). Namun secara umum, kemiskinan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan pengeluaran biaya hidup cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah (Palijama, 2022).

Penanganan kemiskinan di Indonesia sudah lama menjadi agenda nasional (Jazuli, 2015). Mengatasi kemiskinan, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi perlu dipecahkan bersama (Monintja & Yusfiandayani, 2018). Kemiskinan kerap mendorong munculnya masalah sosial lainnya, seperti kesehatan, kriminalitas, konflik keluarga maupun konflik sosial dan pendidikan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah merupakan salah satu dampak dari yang muncul akibat kemiskinan (Istan, 2017).

Kemudian dalam mengatasi masalah kemiskinan ini Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Namun demikian kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target utama dalam program pembangunan nasional (Putri, 2017). Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan (Prayetno, 2013). Sehingga hal ini memerlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya perikanan. Potensi perikanan didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang, dan hutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta bernilai ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah yang sering disebut wilayah pesisir (Retnowati, 2011). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaen/kota (Sumber et al., 2020).

Demikian, masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir (Guanabara et al., n.d.). Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lainlain. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan masyarakat di wilayah perdesaan dan atau wilayah perkotaan (Nikijuluw, 2001).

Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Prapti & Betiri, 2021). Oleh karena itu, harus diketahui akar yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek (Kristiyanti, 2016).

Kemudian kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara

dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan yang mengakibatkan pada hasil tangkapan ikan sedikit tentunya berdampak pula pada pendapatan yang akan didapat (Vatria, 2010).

Selain itu diketahui bahwa masyarakat miskin pesisir perlu diberdayakan sedemikian rupa. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, mereka sangat tergantung dari pemanfaatan hasil melaut dan dikatakan masyarakat miskin bekerja dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan dan pekerjaan lain di laut setempat (Ginting, 2020). Sebagian besar hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Untuk pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan anak sekolah, dan aktualisasi diri belum menjadi prioritas untuk dipenuhi (Retnowati, 2011). Dengan melihat kondisi tersebut perlu kiranya masyarakat miskin pesisir pantai di Kabupaten Bima diberikan peningkatan usaha kesejahteraannya melalui pemberdayaan.

Bertolak dari kondisi kemiskinan masyarakat pesisir tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan guna untuk mengetahui strategi pemberdayaan sosial ekonomi-masyarakat pesisir Kabupaten Bima. Mengingat masih rendahnya tingkat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di pesisir Kabupaten Bima, padahal didukung oleh sumber daya pesisir yang potensial untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir. Melalui tulisan ini juga akan diperoleh informasi identifikasi peran sosial terutama kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat pesisir di Kabupaten Bima. Artikel ini diharapkan sebagai bahan solusi pengembangan kebijakan dan program sosial penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Bima.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok Masyarakat Pengawas di Pesisir, Kelompok Tani Pugar, Komunitas Pesisir, dan Komunitas Ekonomi Kreatif (Ekraf). Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas pesisir, Kelompok Tani Pugar, Komunitas Ekraf di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menentukan informan pada penelitian ini peneliti mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, perhatian, keterlibatan, dan keberadaannya di wilayah pesisir Kabupaten Bima. Selain itu data juga di peroleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Secara umum dalam penelitian ini jumlah persentase informan laki-laki lebih banyak dari pada informan perempuan, sebab dalam penelitian ini, peneliti tidak terlalu mempertimbangkan aspek keterwakilan perempuan, juga informan laki-laki yang peneliti temui lebih bersedia untuk diwawancarai dari pada informan perempuan. Dimana terdapat 79% informan laki-laki, sementara informan perempuan sebanyak 21%.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 64 Desa pesisir dengan sebanyak 14.201 orang yang tercatat berprofesi sebagai nelayan namun diantaranya juga masih menggunakan perahu tempa tradisional untuk mencari ikan yaitu sebanyak 1.203 jumlah perahu, sedangkan yang sudah menggunakan perahu motor dan kapal motor masing-masing 1.317 dan 1.907 unit. Selain itu tercatat sebanyak 2.838 jumlah rumah tangga yang punya usaha perikanan budidaya di wilayah pesisir, namun masih tingginya jumlah rumah tangga pra sejahtera di wilayah pesisir sebagai bukti kelemahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima.

Berikut tabel perbandingan jumlah keluarga sejahtera dan pra sejahtera berdasarkan kecamatan pesisir Kabupaten Bima.

Tabel 1. Perbandingan jumlah keluarga sejahtera dan pra-sejahtera di Kecamatan Pesisir Kabupaten Bima

Kecamatan	Keluarga Pra-sejahtera (Tahun)		Keluarga Sejahtera (2021)
	2020	2021	
Sape	271	1841	2820
Langgudu	1548	183	689
Lambu	693	1195	1731
Wera	2806	1126	1438
Palibeo	1561	2158	1036
Bolo	1521	1879	2870
Soromandi	1777	415	1123
Sanggar	3567	718	728
<b>Total</b>	<b>13744</b>	<b>11166</b>	<b>11707</b>

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Bima dalam angka 2022

Pemberdayaan (*empowerment*) mencerminkan adanya pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) untuk meningkatkan kesadaran politik atau kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan (Kamariyah, n.d.). Dalam pemberdayaan juga tercermin prinsip konsultasi, delegasi kekuasaan, adanya kontrol masyarakat, juga penukaran informasi, dan kemitraan (Lily Sri Ulina Peranginangin, 2014).

Tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima adalah untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Pemberdayaan sosial-ekonomi sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk pemberdayaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, yang dilengkapi dengan proses pembangunan ekonomi (Hasan & Muhammad, 2018).

Sehingga bersama seluruh stakeholder termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas-komunitas, dan masyarakat pesisir saling berbagi peran dalam perencanaan, juga untuk mempengaruhi dan mengontrol kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi, baik untuk kepentingan pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, maupun konservasi sumber daya wilayah pesisir di Kabupaten Bima (Persada, 2018).

Demikian, sebagai kawasan yang membutuhkan peran *multi-stakeholder* dalam pengelolaannya, maka Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, harus bisa berkolaborasi dalam pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir di Kabupaten Bima (Kurnia, 2015).

Keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan pengelolaan yang demokratis partisipatif pada sumber daya pesisir maka nantinya akan mampu mengidentifikasi, mengkodifikasikan dan berbagi pengetahuan yang kemudian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah

Daerah untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Bima (Haeril et al., 2021). Karena disadari bahwa konflik kepentingan yang melibatkan Pemerintah, antar sektor, masyarakat pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas-komunitas dan pengusaha, terjadi oleh karena perbedaan perspektif dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (Indarti & Wardana, 2014).

Berikut adalah strategi Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dengan melakukan pemetaan dan rencana zonasi di wilayah pesisir. Pemetaan dan arahan pengembangan sistem pengelolaan di wilayah pesisir Kabupaten Bima dilakukan dengan menyesuaikan dengan potensi kawasan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ataralain:

1. Kawasan Sanggar dan sekitarnya dengan arahan pengembangan sebagai Pusat Kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut dan pertambangan pasir besi, dan pariwisata
2. Kawasan Teluk Bima meliputi Kecamatan Palibelo, Wohu, Bolo, Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan budidaya laut, budidaya payau, tambak garam, pariwisata, kawasan strategis kabupaten;
3. Kawasan Sape, Lambu dan sekitarnya dengan arahan pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya payau, pariwisata, konservasi, pertambangan pasir besi;
4. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya dengan arahan pengembangan Pusat Kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya air payau, konservasi, wisata bahari, wisata budaya,
5. Kawasan Pantai Utara Ambalawi dan Wera dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi.
6. Kawasan Pantai Utara Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi.
7. Kawasan Pantai Utara Tambora dengan arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan budidaya laut, perikanan tangkap, wisata dan konservasi.
8. Pengembangan perikanan budidaya air payau (tambak) di Kecamatan Langgudu, Monta, Bolo, Soromandi, Wohu, Palibelo, Wera, Sape, Lambu, Sanggar.
9. Pengembangan perikanan budidaya air laut di Kecamatan Langgudu, Wera, Sape, Lambu, dan Sanggar.

Kemudian dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kelautan Perikanan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem perikanan dan kelautan dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

Keberadaan Pokmaswas selain untuk mengawasi sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan, membantu ketersediaan data sebaran terumbu karang baik yang rusak maupun yang masih baik, membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan patroli monitoring dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, juga mengelola kelestarian ekosistem dan lingkungan pesisir termasuk dalam rehabilitasi mangrove (Ariana, 2016). Untuk kegiatan terakhir Dinas Kelautan Perikanan maupun Badan Lingkungan Hidup juga memberdayakan kelompok binaan yaitu masyarakat pesisir yang telah mengikuti pelatihan penanaman dan rehabilitasi mangrove.

Keberadaan Pokmaswas sebagai pelaksana pengawasan di tingkat lapangan akan membantu Pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 4 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan) (Nasution, A. M., Wiranto, S., & Madjid, 2018).

Sedangkan dari sisi pemberdayaan ekonomi, Dinas Kelautan Perikanan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (*PEMP*) dalam mewujudkan masyarakat perikanan yang memiliki motivasi, terampil, berwawasan luas dan mampu bekerjasama dalam suatu wadah kelompok (Ariana, 2016). Melalui kegiatan pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir serta pendampingan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (*PUGAR*), dan kerjasama perikanan (Furqon et al., 2020).

Keberadaan kelompok ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengenalan produk unggulan perikanan dan menumbuhkan motivasi dan kerjasama antar masyarakat nelayan pesisir untuk berprestasi dalam kelompok di wilayah pesisir Kabupaten Bima (Parmi, 2022).

Pada tahun 2021 data statistik perikanan tangkap Kabupaten Bima sebanyak 78.228, 50 ton, dan 130.391,40 ton perikanan budidaya. Untuk mendukung potensi tersebut Dinas Kelautan Perikanan melalui program peningkatan dan pengembangan produksi, pengolahan dan mutu hasil perikanan melakukan upaya pengembangan usaha bidang penangkapan, usaha bidang budidaya dan usaha bidang pengolahan hasil perikanan.

Berdasarkan laporan tahunan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, produk ikan kering sebagai pengolahan ikan hasil tangkapan dan budidaya yang rata-rata menjadi usaha masyarakat pesisir telah dipasarkan sampai ke Banyuwangi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya peluang usaha yang cukup besar ini masyarakat pesisir diharapkan mampu untuk mengembangkan diri secara swadaya sehingga dapat mengelola potensi sumber daya perikanan yang ada dengan optimal.

Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima juga memberikan bantuan berupa modal usaha dan peralatan untuk mendukung kegiatan bidang perikanan baik secara tradisional maupun modern (*intensif*) dalam rangka peningkatan produksi sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan nelayan/pembudidaya (Mirawati, 2018).

Untuk program kegiatan pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (*PUGAR*) dimana pada tahun 2021 telah terbentuk 362 kelompok dari 3.629 orang petani. Pada tahun 2018 telah dialokasikan dana sebesar 80 juta rupiah, dengan realisasi sebesar 64 juta rupiah atau 80 persen untuk tujuan pendampingan dalam pemberdayaan usaha garam rakyat selain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, juga untuk meningkatkan semangat produksi petani garam, walaupun produksi garam rakyat di Kabupaten Bima yang masih sangat bergantung pada cuaca dan iklim yang terjadi sepanjang tahun, jika musim kemarau pendek maka akan langsung berdampak signifikan terhadap menurunnya produksi garam. Demikian pada tahun 2019, dimana rincian produksi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (*PUGAR*) Kabupaten Bima masih sebagai penyumbang produksi garam tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 50,78 dengan total produksi sebesar 263.224,76 ton namun lebih rendah dari produksi tahun 2015 yaitu sebesar 7,24%, dan 8,73% dari produksi tahun 2014. Namun demikian dengan kehadiran program *PUGAR*, dapat menghasilkan mutu garam yang lebih baik dan memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir, di tengah Negara kepulauan dengan potensi laut yang melimpah, adalah suatu ironi ketika kebutuhan garam di Indonesia tidak tercukupi (Widiarto et al., 2013).

Sedangkan dalam pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, terutama dalam mendukung Program prioritas SAKOSA (Sangiang, Komodo, dan Sape) maka Pemerintah mengedepankan semangat pengembangan Ekonomi Kreatif (*Ekraf*) dalam mendorong ekonomi masyarakat pesisir (Haeril, et.,al, 2020). Melalui program penyediaan dan pemberdayaan Gazebo dan Kios Ekonomi Kreatif, sehingga masyarakat pesisir yang tergabung dalam Komunitas Ekonomi Kreatif Kecamatan Wera merespon dengan menghibahkan tanah mereka di wilayah daratan pesisir, untuk mendukung program pembangunan prasarana pariwisata tersebut dengan catatan selain

masuk kas Daerah (PAD), juga ada pembagian pendapatan dengan masyarakat pesisir dari hasil pendapatan pariwisata tersebut (Deskriptif et al., 2019).

Selain itu hampir rata-rata kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima selalu bisa diakses berkat pengusaha-pengusaha tambak (Furqon, & Subagiyo, 2020). Kehadiran tambak di wilayah pesisir selain telah mampu membuka jalur perintis (akses jalan) menuju kawasan wisata yang selama ini belum menjadi perhatian Pemerintah sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum. Selain itu kehadiran tambak juga telah mengekspos kawasan wisata baru di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima seperti, pantai Lariti, pantai Mata Mboko, pantai Torowamba, Pantai *Pink*, pulau kelapa, dan pantai wane (Bahri, 2020).

Selain itu juga ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masyarakat pesisir bentukan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, kelompok ini dibentuk untuk mewujudkan kemitraan dalam pengembangan, penataan, pemeliharaan dan promosi wisata di Kabupaten Bima. Kelompok ini juga di bantu oleh komunitas Pesisir dan Kelompok Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam menunjang program Sapta Pesona pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dinas Pariwisata juga mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir melalui program pembangunan dan pemberdayaan Gazebo dan kios Ekonomi kreatif di kawasan pariwisata. Dimana melalui pembangunan Gazebo dan kios tersebut selain untuk penunjang wisata juga dapat membangun jiwa *entrepreneurship* bagi masyarakat pesisir (Asghary, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, Pemerintah Kabupaten Bima melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya kelautan perikanan dengan membentuk Pokmaswas. Selain itu pemberdayaan juga dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (*PEMP*) dalam mewujudkan masyarakat perikanan yang memiliki motivasi, terampil, berwawasan luas dan mampu bekerjasama dalam suatu wadah kelompok melalui program peningkatan dan pengembangan produksi, pengolahan dan mutu hasil perikanan, pengembangan usaha bidang penangkapan dan budidaya serta usaha bidang pengolahan hasil perikanan. Juga pendampingan Pemberdayaan bagi Usaha Garam Rakyat (*PUGAR*). Pemberdayaan juga dilakukan dari sekotr pariwisata terutama dalam mendukung Program prioritas SAKOSA melalui pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu juga ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masyarakat pesisir dibentuk untuk mewujudkan kemitraan dalam pengembangan, penataan, pemeliharaan dan promosi wisata di Kabupaten Bima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426.
- Ariana, R. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1–23.
- Asghary, H. (2020). Strategi komunikasi pariwisata dinas pariwisata kabupaten Bima dalam meningkatkan minat wisatawan. *Commicast*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.12928/commicast.v1i1.2410>
- Bahri. (2020). Gawai Kewirausahaan Desa: Pergerakan Desa Menuju Sejahtera Dan Mandiri Ekonomi. In *CV. Bintang Sejahtera* (Issue July 2021).
- Deskriptif, S., Kelompok, P., Adat, M., Sambori, S., Madasusa, ", Di, ", Sambori, D., Lambitu, K., Bima, K., Memenuhi, U., Persyaratan, S., Derajat, M., & Sarjana, G. (2019). *Gerakan Revitalisasi Eko Dan Etno Wisata Berbasis Modal Sosial*.
- Furqon, A., Wijayanti, W. P., & Subagiyo, A. (2020). Persepsi Wisatawan terhadap Aspek Penawaran Wisata Pantai Lariti Kabupaten Bima. *Tata Kota Dan Daerah*, 12(2), 95–100. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2020.012.02.4>

- Ginting, A. H. (2020). Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 36–50. <https://doi.org/10.33701/jt.v12i1.822>
- Guanabara, E., Ltda, K., Guanabara, E., & Ltda, K. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 1–6.
- Haeril, Anilawati, N., & Suraya. (2021). Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Tata Sejuta*, 7(1), 1–30.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). 1| *Pembangunan Ekonomi*.
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2014). Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemhwungkuk Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1–12.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>
- Jazuli, A. (2015). Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tinjauan Aspek Koordinasi Kelembagaan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4(2), 181–197.
- Kamariyah, S. (n.d.). *Pembinaan Bimtek untuk Pemberdayaan Masyarakat – Christiana A, Sri Kamariyah, ETTY K.* 3(2), 435–455.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 180, 752–760.
- Kurnia, L. K. (2015). Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Kemitraan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya antara Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 1–10.
- Lily Sri Ulina Peranginangin. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 66–78.
- Mirawati, M. (2018). *Peningkatan Produksi Masyarakat Nelayan di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima melalui Pemberdayaan Masyarakat*.
- Monintja, D., & Yusfiandayani, R. (2018). Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, November, 59–65.
- Nasution, A. M., Wiranto, S., & Madjid, A. (2018). Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Dan Pembinaan Desa Pesisir (BINDESIR) Untuk Membentuk Satuan Armada Nelayan (SATARMANEL) Dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. *Keamanan Maritim*, 4(1), 25–46.
- Nikijuluw, V. P. H. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. *Makalah PELatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Institut Pertanian Bogor, 1, 160.
- Palijama, F., Penanganan, T., & Sosial, M. (2022). *Perkembangan teori sosial dan teoritik penanganan masalah sosial di indonesia*. 2, 12–20.
- Persada, C. (2018). Perencanaan Pariwisata dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Prapti, K. P., & Betiri, M. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Jember Coastal Community Empowerment Strategy in Jember Regency resources ). Sejumlah desa pesisir di selatan Jawa Timur merupakan obyek pembangunan dan pengembangan yang Komoditas perikanan tangkap di*. 6(July), 251–265.
- Prayetno. (2013). Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian). *Media Komunikasi FIS*, 12(1), 30–45.
- Putri, L. I. (2017). *Reduksi kemiskinan melalui sociopreneurship*. VI(1), 48–68.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Perspektif*, 16(3), 149. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>
- Studi, P., Administrasi, I., Sosial, F. I., & Makassar, U. N. (2020). *Masalah - Masalah Sosial Yang Sering Terjadi Di Indonesia Mid Semester 1 Pengantar Sosiologi Dan Antropologi Oleh: Raihan Maulana*



*Nasrullah NIM : 200605502067 KELAS : IAN 03 / C 2020. 1–10.*

- Sumber, E., Hayati, D., Dan, P., Wilayah, P., Di, P., & Bengkulu, P. (2020). *DOSEN PENGAMPU : March*.
- Vatria, B. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai serta Dampak yang Ditimbulkannya. *Jurnal Belian, 9*(1), 47–54.
- Widiarto, S. B., Hubeis, M., & Sumantadinata, K. (2013). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Desa Losarang, Indramayu. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 8*(2), 144–154. <https://doi.org/10.29244/mikm.8.2.144-154>